

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang – orang yang mampu memberikan informasi dan data sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mustahik penerima bantuan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Yogyakarta.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner dan wawancara dengan mustahik untuk mengetahui dampak pendistribusian zakat, baik secara pendapatan maupun perilaku atau kehidupan spiritual mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Baznas Kota Yogyakarta untuk menilai badan amil zakat yang bersangkutan. Selain itu, untuk mendukung penelitian ini, menggunakan data – data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, internet, dan situs resmi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

C. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel. Dalam penelitian ini,

jumlah populasi sebanyak 71 orang, sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 71 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur setiap muzaki, mustahik, dan Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta dengan memberikan kuesioner untuk memperoleh data yang diperlukan. Selain itu penelitian menggunakan teknik wawancara untuk melengkapi informasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis, pedoman wawancara berupa pertanyaan permasalahan secara garis besar.

E. Definisi Operasional

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Zakat

Zakat dalam merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat islam, dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya kepada orang – orang yang berhak menerimanya sesuai dengan 8 asnaf, baik secara langsung maupun melalui dan atau lembaga amil zakat. Dalam penelitian ini zakat yang dimaksud adalah zakat yang diberikan kepada Baznas Kota Yogyakarta untuk dikelola yangselanjutnya akan diberikan kepada 8 asnaf penerima zakat melalui program Jogja Sejahtera.

b. Kesenjangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan merupakan suatu keadaan dimana terdapat perbedaan pendapatan yang diterima antara satu kelompok populasi dengan kelompok populasi lainnya. Peneliti ingin melihat bagaimana tingkat kesenjangan pendapatan sebelum dan sesudah pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta.

c. Kesejahteraan

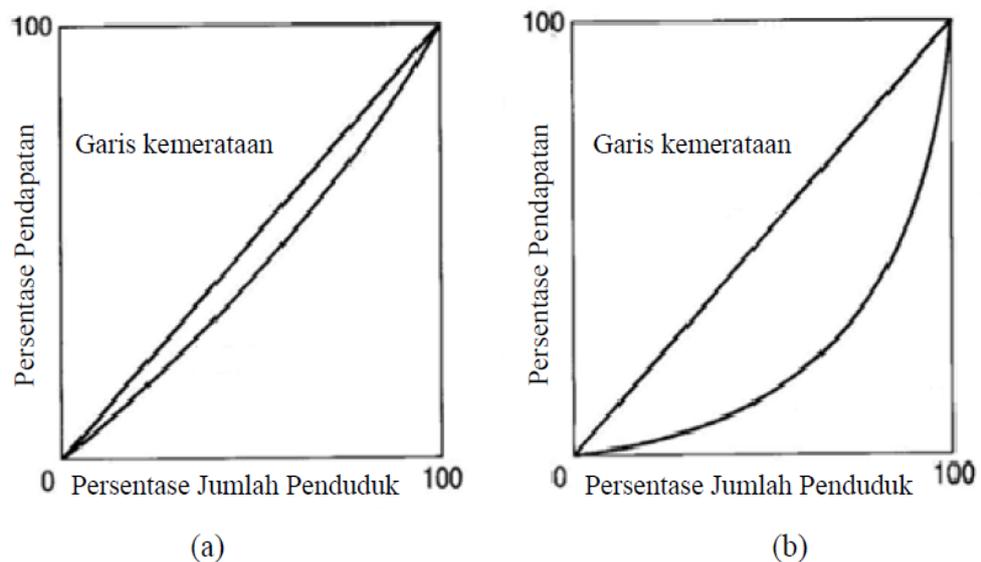
Kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, rasa aman, serta peningkatan kualitas kehidupan baik secara material maupun spiritual. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana tingkat kesejahteraan sebelum dan sesudah pendistribusian zakat.

2. Alat Ukur

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz diambil dari nama Conard Lorenz, seorang ahli statistik Amerika yang menemukan sebuah diagram yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan menurut kelompok penduduk secara kumulatif. Kurva Lorenz terletak pada sebuah garis bujur sangkar, yang mana pada garis tersebut menghubungkan kelompok populasi (sumbu horizontal) dan kelompok pendapatan (sumbu vertikal), sehingga dari kurva tersebut dapat diketahui berapakah proporsi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok

populasi tertentu. Di tengah kurva yang memiliki bentuk bujur sangkar ini, terdapat sebuah garis dengan kemiringan 45° . Pada gambar 3.1, kurva Lorenz yang mendekati garis pemerataan, maka angka ketimpangan di wilayah tersebut semakin kecil (Gambar a). Sebaliknya, semakin kurva Lorenz menjauhi garis pemerataan, maka distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin timpang (Gambar b).



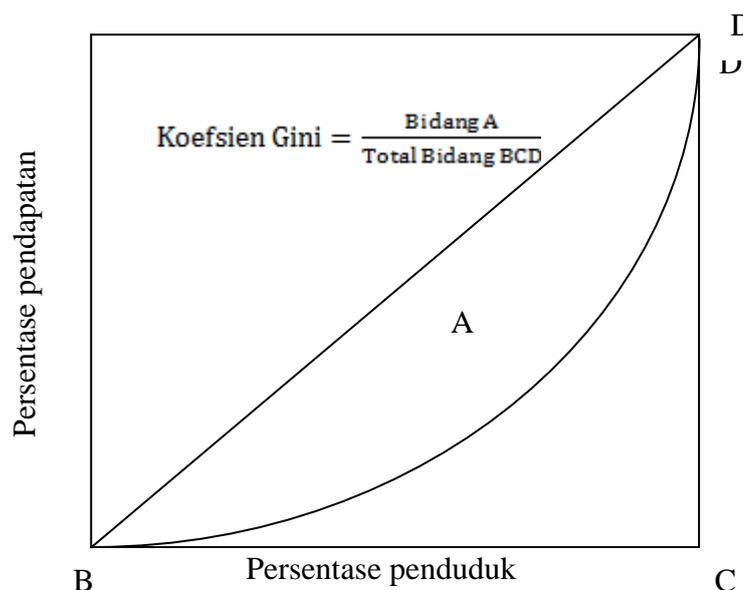
Sumber : Todaro dan Smith, 2011

Gambar 3. 1
Perbandingan Kurva Lorenz

b. Indeks Gini Ratio

Indeks gini ratio merupakan salah satu alat ukur yang sering digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan. Perhitungan gini ratio berasal dari pengukuran luas suatu kurva yang bernama kurva Lorenz. Secara ilustrasi luas kurva Lorenz dapat diperoleh dengan cara

menghitung rasio dari bidang yang berada diantara bidang diagonal dan kurva Lorenz, kemudian dibagi dengan total bidang setengah bujur sangkar tempat kurva tersebut terletak pada gambar 3.2



Sumber : Todaro dan Smith, 2011

Gambar 3. 2
Perhitungan Luas Kurva Lorenz untuk Memperoleh Gini Ratio

Nilai pada indeks gini ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 1 semakin besar ketimpangan di wilayah tersebut. Menurut Oshima, nilai gini ratio dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan rendah, moderat, dan tinggi. Nilai gini ratio 0,3 dikategorikan ketimpangan rendah, nilai gini ratio 0,3 – 0,5 dikategorikan ketimpangan moderat, dan nilai gini ratio <0,5 dikategorikan ketimpangan yang tinggi. Secara matematis, gini ratio dapat dihitung dengan rumus

$$IGR = 1 - \sum_{i=1}^n f p_i (F c_i + F c_{i-1})$$

Keterangan :

IGR = Indeks Gini Ratio

fp_i = Frekuensi keluarga kelompok pendapatan i

F_{ci} = Frekuensi kumulatif total pendapatan dalam kelompok pendapatan i

F_{ci-1} = Frekuensi kumulatif total pendapatan dalam kelompok pendapatan $i-1$

c. Kriteria Bank Dunia

Menurut kriteria Bank Dunia tingkat kesenjangan pendapatan dapat diketahui dengan mengukur berapa bagiankah pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah dengan batasan sebagai berikut :

- 1) Tingkat ketimpangan rendah jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima >17% jumlah pendapatan.
- 2) Tingkat ketimpangan rendah jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 12 - 17% jumlah pendapatan.
- 3) Tingkat ketimpangan rendah jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima <12% jumlah pendapatan.

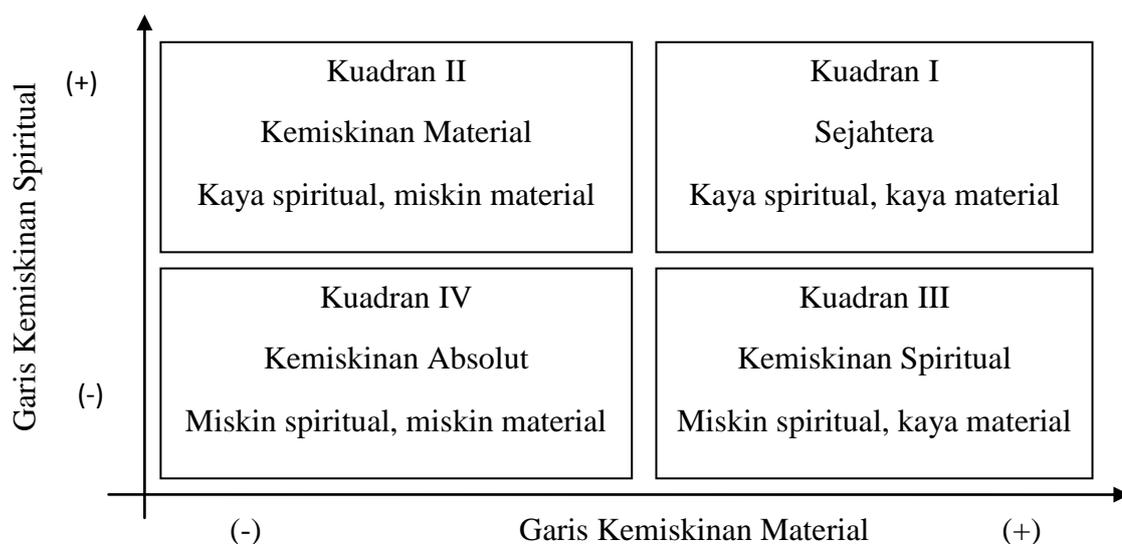
d. Indeks Puskas Baznas (IKP)

Indeks Kesejahteraan Puskas atau IKP merupakan alat ukur yang disusun oleh Tim Peneliti Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Pukas Baznas) untuk mengukur dampak pendayagunaan zakat

terhadap kesejahteraan mustahik. IKP memiliki 3 komponen dalam perhitungannya, yaitu indeks kesejahteraan CIBEST, indeks modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks kemandirian.

1) Indeks Kesejahteraan CIBEST

Indeks CIBEST merupakan indeks kemiskinan islami, yang mana dalam dalam indeks tersebut dibagi menjadi 4 indeks atau kuadran, yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan materiil, dan indeks kemiskinan absolut.



Sumber : Beik dan Arsyanti, 2016

Gambar 3. 3
Kuadran CIBEST

Dalam mengkategorikan status suatu keluarga atau rumah tangga pada kuadran CIBEST, diperlukan standar nilai apakah keluarga tersebut mampu mencukupi kebutuhan secara material atau spiritual. Suatu keluarga dikatakan mampu memenuhi kebutuhan

material apabila pendapatan keluarga tersebut diatas MV (*material value*). MV dapat diperoleh dengan 3 cara. Pertama, dengan melakukan survey kebutuhan primer yang dipenuhi oleh suatu keluarga selama satu bulan. Kedua, dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPS, kemudian dikalikan dengan besaran ukuran rumah tangga, atau mengalikan GK dengan besaran jumlah rata rata anggota keluarga secara agregat. Ketiga dengan menggunakan standar nisab zakat penghasilan.

Sedangkan pemenuhan kebutuhan spiritual dihitung berdasarkan standar pemenuhan 5 variabel, antara lain skor pelaksanaan ibadah shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Untuk menilai skor pada masing – masing dari variabel tersebut digunakan skala likert 1 – 5. Semakin tinggi skornya, semakin baik kondisi spiritualnya. Suatu keluarga dikatakan mampu memenuhi kebutuhan spiritual apabila garis *Spiritual Value (SV)* nilainya sama dengan 3. Untuk menghitung kondisi spiritual individu, didasarkan pada rumus:

$$H_i = \frac{V_{pi} + V_{fi} + V_{zi} + V_{hi} + V_{gi}}{5}$$

Dimana,

H_i : Skor aktual anggota rumah tangga ke-i

V_{pi} : Skor sholat anggota rumah tangga ke-i

V_{fi} : Skor puasa anggota rumah tangga ke-i

Vzi : Skor zakat dan infak anggota rumah tangga ke-i

Vhi : Skor lingkungan keluarga menurut anggota keluarga ke-i

Vgi : Skor kebijakan pemerintah menurut anggota keluarga ke-i

Langkah selanjutnya adalah menentukan skor spiritual rumah tangga atau keluarga, dengan rumus sebagai berikut :

$$SH = \sum_{h=1}^n \frac{H_1 + H_2 + \dots + H_n}{MH}$$

Dimana,

SH : Skor rata-rata kondisi spiritual keluarga

h : Skor kondisi spiritual anggota keluarga ke-h

MH : Jumlah anggota keluarga

Langkah terakhir adalah mengukur kondisi spiritual keluarga – keluarga dalam suatu wilayah, dengan rumus

$$SS = \sum_{k=1}^n \frac{SHk}{N}$$

Dimana,

SS : Skor rata-rata kondisi spiritual keseluruhan keluarga yang diamati

SHk : Skor kondisi spiritual keluarga ke-k

N : Jumlah keseluruhan keluarga yang diamati di suatu wilayah

Namun dalam penelitian ini, skor kebutuhan spiritual diperoleh dengan menggunakan pendekatan persepsi dari kepala keluarga. Kepala keluarga menggambarkan kondisi masing-masing variabel indikator kebutuhan spiritual dalam rumah tangga tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan kondisi.

Dalam perhitungan IKP, indeks CIBEST yang diperlukan hanya besaran indeks kesejahteraan, formula indeks kesejahteraan adalah sebagai berikut:

$$W = \frac{w}{N}$$

Dimana:

W = Indeks kesejahteraan; $0 \leq W \leq 1$

w = Jumlah keluarga sejahtera atau berada di kuadran 1

N = Jumlah keluarga yang diobservasi

2) Indeks Modifikasi IPM

IPM digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia dari segi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Namun, komponen IPM yang diperlukan untuk perhitungan IKP hanya dari segi kesehatan dan pendidikan. Hal ini dikarenakan komponen pendapatan dan daya beli sudah termasuk dalam perhitungan CIBEST. Oleh karena itu perhitungan IPM dalam IKP disebut modifikasi IPM atau *Modified HDI*. Salah satu kajian terkait *Modified HDI* tersebut pernah dilakukan oleh Nurzaman (2010) dengan istilah disagregasi IPM.

(a) Indeks Kesehatan

Indeks harapan hidup yang saat ini digunakan oleh UNDP dan beberapa negara dalam mengestimasi IPM ditingkat nasional adalah dengan menganggap kondisi ketika individu lahir. Demikian juga untuk tingkat provinsi dan kabupaten, telah sesuai dengan standar nilai IPM internasional. Namun dalam penelitian ini, untuk memperkirakan nilai indeks harapan hidup pada tingkat individu akan dilakukan penyesuaian metode dengan mempertimbangkan variasi sebaran dari populasi. Tahap pertama dalam perhitungan indeks kesehatan adalah menestimasi harapan hidup di tingkat keluarga yang disesuaikan dengan variabel jumlah pendapatan dan usia melalui metode imputasi. Spesifikasi model adalah sebagai berikut

$$Ex_{a,g} = \alpha_0 + \alpha_1 (\ln \text{income } f) + \alpha_2 (\text{gender} + \alpha_4 (\text{age}) + \alpha_5 (\text{age})^2) + u$$

Di mana $Ex_{a,g}$ adalah usia harapan hidup berdasarkan usia (a), jenis kelamin (g) berdasarkan data sekunder yang tersedia. Karena data statistik yang terbatas di Indonesia, nilai harapan hidup berdasarkan usia akan diambil dari *Wealth Health Organization (WHO)*. Kemudian, pendapatan adalah pendapatan per kapita untuk setiap keluarga dan gen adalah variabel dummy untuk jenis kelamin. Tahap kedua adalah mempertimbangkan harapan hidup individu (i) yang telah disesuaikan. Indeks harapan hidup individu dihitung sebagai berikut:

$$IH_i = \frac{(Ex_{a,g}(i) - Ex_{a,g}(\min))}{Ex_{a,g}(\max) - Ex_{a,g}(\min)}$$

Di mana IH_i adalah indeks harapan hidup untuk individu (i); $Ex_{a,g}(i)$ adalah harapan hidup individu (i) yang disesuaikan dengan usia, dan jenis kelamin; Kemudian $Ex_{a,g}(\max)$ dan $Ex_{a,g}(\min)$ adalah data standar internasional untuk harapan hidup maksimum dan minimum yang diambil dari WHO dengan mempertimbangkan distribusi di antara negara-negara. Tahap terakhir adalah, hitung indeks harapan hidup untuk rumah tangga "h" yang diperoleh dari indeks rata-rata untuk seluruh keluarga

$$IH_h = \Sigma (IH_i/n)$$

Di mana n adalah jumlah anggota rumah tangga di rumah tangga "h".

(b) Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan menggunakan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas pada jenjang pendidikan formal yang dijalani. Dengan kata lain, indikator ini dihitung berdasarkan tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angka melek huruf juga diperlakukan untuk penduduk usia 15 tahun atau lebih dengan indikator yang diperoleh dari kemampuan membaca dan menulis. Untuk indikator melek huruf, 100 menggambarkan kondisi masyarakat yang mampu

membaca dan menulis dan kondisi 0 untuk sebaliknya. umus untuk menghitung indeks pendidikan adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pendidikan} = \{2/3 [(\text{Lit} - 0)/(100 - 0)] + 1/3 [LS - 0) / (15 -0)] \times 100$$

Keterangan:

Lit = angka melek huruf

LS = lama sekolah

0 = jumlah minimum Lit dan LS

100 = jumlah maksimum dari Lit

15 = jumlah minimum lari LS

Dengan demikian, Modifikasi IPM dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Indeks Modifikasi IPM} = 1/2 (\text{Indeks Kesehatan}) + 1/2(\text{Indeks Pendidikan})$$

3) Indeks Kemandirian

Perhitungan selanjutnya adalah kemandirian mustahik. Perhitungan kemandirian ini dilihat dari apakah mustahik memiliki pekerjaan tetap atau usaha, serta apakah mustahik memiliki tabungan. Penilaian kemandirian berupa *likert scale* dengan skor 1-5. *Likert scale* pada variabel kemandirian meliputi

Tabel 3. 1
Indeks Kemandirian

Kriteria				
(1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
1	2	3	4	5
Tidak memiliki pekerjaan dan usaha/bisnis	Memiliki pekerjaan tidak tetap (serabutan)	Hanya memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis	Memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis dan memiliki tabungan	Memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis dan tabungan

Sumber : Puskas Baznas

Indeks kemandirian tersebut memberikan formula penghitungan pada setiap variabelnya dengan menggunakan rumusan sebagai berikut

$$I_i = \frac{(S_i - S_{min})}{S_{max} - S_{min}}$$

Dimana,

I_i = Indeks pada variabel i

S_i = nilai skor aktual pada pengukuran variabel i

S_{max} = Skor maksimal

S_{min} = Skor minimal

Langkah terakhir adalah mengkuantifikasikan ketiga variabel, sehingga rumus perhitungan IKP adalah

$$D = (X_{221}) \times 0,40 + (X_{222}) \times 0,40 + (X_{223}) \times 0,20$$

Dimana:

(X_{221}) = Indeks Kesejahteraan CIBEST (nilai kesejahteraan material dan spiritual)

(X_{222}) = Indeks Modifikasi IPM (pendidikan dan kesehatan)

(X_{223}) = Nilai Kemandirian

Dari penilaian tersebut maka akan dihasilkan nilai dari 0 – 1, dimana nilai 0 mempresentasikan kondisi rumah tangga yang tidak sejahtera, sementara nilai 1 sebagai kondisi rumah tangga yang sudah sejahtera. Klasifikasi ranking dari penilaian tersebut dapat diprotret pada tabel serikut:

Tabel 3. 2
Kategori Penilaian Indeks Kesejahteraan Puskas (IKP)

Score Range	Keterangan
0,00 – 0,20	Tidak baik
0,21 – 0,40	Kurang baik
0,41 – 0,60	Cukup baik
0,61 – 0,80	Baik
0,81 – 1,00	Sangat baik

Sumber : Puskas Baznas

Semakin nilai IKP mendekati 1 maka kondisi keluarga di wilayah pengukuran semakin baik atau sejahtera. Artinya intervensi zakat di wilayah tersebut juga sudah memberikan dampak positif. Sebaliknya, semakin nilai IKP mendekati 0 maka kondisi keluarga yang diintervensi zakat tidak mengalami perbaikan.

F. Uji Kualitas dan Instrumen Data

1. Uji validitas

Uji validitas dalam penelitian diperlukan untuk melihat valid tidaknya suatu skala pengukuran. Disebut valid apabila skala pengukuran tersebut melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Apabila skala pengukuran tersebut tidak valid, maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur apa yang seharusnya diukur dan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ada beberapa macam validitas yang diperlukan menguji ketepatan ukuran, diantara validitas isi dan validitas konsep. Validitas isi memastikan bahwa pengukuran telah memasukkan sekumpulan item yang memadai dan mewakili yang mengungkap konsep. Sedangkan validitas konsep adalah menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari pengukuran sesuai dengan teori dimana pengujian itu dirancang. Variabel dalam uji validitas dikatakan valid apabila total nilai korelasi antar variabel memiliki total skor $>0,25$ (Basuki, 2015).

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas diperlukan untuk menetapkan instrumen (kuesioner) dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Suatu variabel dinyatakan memiliki reabilitas yang mencukupi jika memiliki nilai alpha $>0,70$ (Basuki, 2015).